**Pendapat dan Analisis Pendiri Bangsa**

1. Opini para tokoh pendiri bangsa tentang dasar negara Indonesia:

* Moh. Yamin menyarankan lima dasar negara disebut Peri : Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan, dan Kesejahteraan Rakyat, yang memiliki keseimbangan nilai kebangsaan dan kemanusiaan.
* Soepomo mengusulkan ide negara integralistik, di mana individu menyalurkan kepentingan mereka ke negara. Persaturan dan kerjasama antara pemerintah dan rakyat adalah bagian dari pandangannya tentang dasar negara.
* Ir. Soekarno mengusulkan lima prinsip Pancasila : Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan, Mufakat atau Demokrasi, Kesejahteraan Sosial, dan Ketuhanan Yang Maha Esa. Soekarno menyatukan nilai-nilai yang berbeda dalam konsep yang inklusif.

1. Meskipun tokoh-tokoh tersebut berkonsentrasi pada elemen yang berbeda kebangsaan dan kemanusiaan, persatuan integralistik, dan komprehensif Pancasila mereka semua memiliki keinginan yang sama. Membangun sebuah negara merdeka, berdaulat, dan adil. Pendiri bangsa sepakat bahwa Indonesia harus menjadi negara yang mendukung kesejahteraan rakyatnya, persatuan, dan nilai-nilai kemanusiaan dan ketuhanan.Negara merdeka adalah negara yang memiliki kedaulatan penuh dan arah kebijakan independen dan memastikan hak asasi manusia dan keadilan sosial bagi rakyatnya.
2. Berbagai aspek dalam proses perancangan dan isi dari rumusan dasar negara, yang lebih dikenal sebagai Mukadimah Hukum Dasar atau Piagam Jakarta mencerminkan usaha kompromi antara berbagai kelompok dalam masyarakat Indonesia saat itu, terutama antara golongan nasionalis dan golongan Islam. Piagam Jakarta, yang disusun oleh Panitia Sembilan pada 22 Juni 1945 ini mengandung rumusan Pancasila dengan butir pertama “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.”. Piagam ini merupakan hasil perdebatan dan negosiasi yang panjang, mencerminkan sebuah upaya menciptakan dasar negara yang dapat diterima oleh seluruh elemen bangsa. Meskipun pada akhirnya, demi persatuan, amandemen pada hari 18 Agustus 1945 mengganti rumusan tersebut dengan “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Namun Piagam Jakarta tetap dianggap sebagai satu dari beberapa tonggak dalam sejarah rumusan dasar negara Indonesia.